



Karyawan Hotel Hanya Bisa Pasrah

■ Jam Kerja Dikurangi Hingga Risiko Dirumahkan

Hampir secara umum hotel kena dampaknya, jadi untuk karyawan dikurangi jam kerja. Apalagi untuk daily worker (pekerja kasual) seperti saya

YOGYA, TRIBUN - Industri perhotelan di DIY memang tengah lesu pasca-kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Hal ini berdampak kepada banyak karyawan hotel yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya.

Pengurangan jam kerja itu dirasakan langsung oleh Tita (25) yang bekerja di salah satu hotel bintang tiga di DIY. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah cukup memukul okupansi hotel tempatnya bekerja.

"Mulai akhir Februari sampai sekarang (pengurangan jam kerja). Normalnya 25 atau 26 hari, tapi karena efek efisiensi dari pemerintah, sekarang jam kerja dikurangi jadi 15 sampai 18 hari saja," katanya, Kamis (15/5).

"Karena biasanya untuk event di hotel banyak dari grup pemerintah. Hampir secara umum

● ke halaman 11



BERTAHAN SEKUAT TENAGA

Industri perhotelan di DIY tengah lesu pasca-kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Dampaknya, banyak karyawan hotel yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya.

Jam kerja dikurangi jadi 15 sampai 18 hari dari sebelumnya jam kerja 25 atau 26 hari.

Kontrak pekerja kasual diperbaharui setiap tiga bulan dan gaji diterima berdasarkan kedatangan.

Secara otomatis, penghasilan sejumlah karyawan hotel berkurang bahkan di bawah UMR.

Untuk menyiasati hal ini, mereka memilih untuk menghemat demi bisa tetap bertahan.



GIDAPIS/PUTI DAKHMAN

Karyawan Hotel

• Sambungan Hal 1

hotel kena dampaknya, jadi untuk karyawan dikurangi jam kerja. Apalagi untuk *daily worker* (pekerja kasual) seperti saya," sambungnya.

Sebagai pekerja kasual, ia tetap memiliki kontrak kerja dengan perusahaan. Hanya saja kontrak kerja diperbarui setiap tiga bulan. Gaji yang ia terima juga berdasarkan kedatangan. Sehingga pihak manajemen bisa mengurangi jam kerja.

Ia mengaku pengurangan jam kerja cukup berdampak pada pendapatan yang diterima. Sejak jam kerjanya dikurangi, pendapatannya terpotong sekitar 30 persen. "Sekarang pun terhitung di bawah UMR (Upah Minimum Regional) Yogya," ungkapnya.

Untuk menyalasatinya, warga Kebumen itu memilih untuk menghemat. Sudah tiga tahun ini ia bekerja di hotel. Sehingga pengeluaran paling besar untuk indeks. Beruntung ia bekerja di bagian dapur. Pihak hotel menyediakan satu kali makan.

"Untungnya saya di *kit-chen*, jadi untuk makan kadang pas berangkat dan pulang bisa makan dulu. Jadi lumayan menghemat," ujarnya.

Selain mengencangkan ikat pinggang, ia pun kini masih berupaya untuk mencari pekerjaan lain. Ia pun berharap blokir anggaran pemerintah dibuka kembali, sehingga dunia perhotelan kembali membaik seperti semula.

"Meskipun nggak sepenuhnya, tetapi itu cukup membantu bagi kami anak perhotelan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Dedy Pranowo Eryono menyebut ada sekitar 5.000 karyawan hotel dan restoran di DIY dirumahkan. Hal itu akibat lesunya kegiatan Me-

eting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) sebagai dampak efisiensi anggaran pemerintah.

Kami menghindari PHK, sementara dari Januari 2025 sampai saat ini hanya merumahkan. Mereka tetap diganti tetapi tidak penuh," katanya. Selasa (13/5).

Anggota PHRI DIY terdiri dari 458 hotel dan restoran, sekitar 5.000 karyawan yang dirumahkan. Kemudian dari hotel dan restoran itu paling tinggi hotel bintang 3 sampai 5, tapi ada yang non bintang, restoran juga ada," sambungnya.

Saat libur panjang Waisak kemarin, pihak hotel kembali memanggil karyawan. Sebab okupansi hotel tinggi, rata-rata di DIY mencapai 75 persen untuk periode 9-12 Mei 2025. Di Kota Yogya dan Kabupaten Sleman okupansi pada 10-11 Mei 2025 mencapai 90 persen bahkan 100 persen.

"Kami ya tergantung dari tamu, kalau banyak baru kami panggil lagi (karyawan yang dirumahkan). Seperti kemarin saat libur Waisak, kami panggil lagi untuk memperkuat karena okupansi tinggi," imbuhnya.

Belum ada aduan
Sementara itu, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY belum menerima aduan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun adanya karyawan yang dirumahkan dari sektor perhotelan di DIY.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsakertrans) DIY, Amin Subargus mengatakan saat ini memang sedang mengalami tekanan.

Selain karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, ada pula pengaruh internasional yang kemungkinan berdampak pada industri perhotelan. Namun ia menyebut belum menerima la-

poran terkait karyawan yang dirumahkan.

"Saya ngecek belum ada yang dirumahkan, di PHK, baik pekerja tetap atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) belum ada. *Daily worker* mungkin ada (yang dirumahkan), tapi pengaduannya belum ada," katanya, Kamis (15/5).

Ia menerangkan, sektor perhotelan menjadi prioritas pengawasan sejak awal 2020 lalu, saat pandemi Covid-19. Setiap tahun, pihaknya memiliki rencana kerja unit pengawasan yang dituangkan dalam rencana kerja pengawasan.

Dalam rencana pemeriksaan, pengawas akan melakukan pemeriksaan minimal lima usaha dan minimal satu usaha adalah hotel. "Dalam pemeriksaan itu juga termasuk jenis pekerjaan, harian atau kasual tadi termasuk," katanya.

"Tentu kami melakukan upaya-upaya, salah satunya mengeluarkan nota pemeriksaan, terkait preventif dan edukatif, agar *daily worker* itu diarahkan ke perjanjian kerja kontrak," terang Amin.

Pihaknya pun terus mengupayakan agar pekerja di DIY, termasuk pekerja kasual mendapatkan hak-haknya, seperti upah hingga jaminan sosial. Pihaknya juga melakukan pembinaan dengan bersinergi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, serta general manager hotel.

"Kami secara rutin melakukan sosialisasi, *sharing*, diskusi, kami melakukan upaya preventif edukatif. Kami juga mengadakan pembinaan, supaya pada akhirnya *daily worker* yang sifatnya tetap ini diarahkan PKWT. Apalagi kalau bersifat tetap, malahan harusnya menjadi karyawan tetap. Kami juga ada bimtek norma kerja," ujarnya.

Ia pun berharap industri perhotelan di DIY bisa bertahan dan tangguh, sehingga tidak terjadi PHK.

Komite

Di satu sisi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY berkolaborasi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY membentuk Komite Ketangguhan Ekonomi Yogyakarta atau Jogjakarta Economic Resilience Committee (JERCO).

Ketua Umum Kadin DIY, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi mengatakan kondisi ekonomi saat ini melatarbelakangi pembentukan Komite Ketangguhan Ekonomi Yogyakarta. Mulai dari ancaman PHK hingga perlambatan ekonomi.

"Sekalian pemetaan masalah. Masalah ekonomi yang dihadapi pelaku usaha, masalah yang ada di pemerintahan, dan lain-lain. Ini jadi ajang pendataan semua, untuk berdiskusi dengan Pemda, Pemkab, Pemkot, sebagai seperti apa," katanya, Rabu (14/5).

Ketua Komite Ketangguhan Ekonomi Yogyakarta, Timotius Apriyanto menerangkan ada tiga tugas utama yang diemban komite ini, yaitu monitoring dan analisis, advokasi, dan kemanusiaan. Monitoring dan analisis dilakukan oleh pelaku usaha dan akademisi, sehingga menjadi panduan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Sementara advokasi, komite akan memberikan pendampingan hukum dan advokasi kebijakan. Sedangkan kemanusiaan merupakan kegiatan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak kondisi ekonomi.

"Kami juga akan membuka posko pengaduan untuk masalah ekonomi di DIY, di kantor Kadin DIY dan kantor Inspektorat DIY. Komite ini sifatnya ad hoc, yang mengharmonisasikan kasus PHK maupun perlindungan daya saing," terangnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005